

RINGKASAN

Pada era desentralisasi, pemerintah dituntut agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas khususnya pada lembaga penegak hukum. Namun, berbagai pengaduan dari masyarakat menunjukkan adanya jaksa yang bermasalah, termasuk 130 pegawai di salah satu Kejaksaan negeri yang dikenai hukuman disiplin. Selain itu, kinerja kejaksaan dinilai kurang transparan dan lambat dalam menangani kasus. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan *public trust* pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Penelitian ini menggunakan teori *good governance* menurut Sedarmayanti (2004) meliputi transparansi dan akuntabilitas, yang mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai sistem yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga sinergi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Untuk validitas data menggunakan triangulasi metode yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik, antara lain tidak adanya sosialisasi mengenai informasi pelayanan perkara tindak pidana pencurian, informasi publik pada PPID belum diperbarui setiap 6 bulan sekali, tidak adanya laporan kinerja dan laporan keuangan yang ditransparansikan. Pada sub aspek tingkat ketelitian, profesionalitas pegawai, dan kejelasan aturan masih belum optimal.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan *public trust* pada Kejaksaan Negeri Purbalingga masih belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam aspek transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan *public trust* pada Kejaksaan Negeri Purbalingga.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, *Public Trust*

SUMMARY

In the era of decentralization, the government is required to achieve good governance by implementing principles such as transparency and accountability, particularly in law enforcement institutions. However, various public complaints reveal issues with prosecutors, including 130 staff members in one District Prosecutor's Office who faced disciplinary sanctions. Additionally, the performance of the prosecutor's office is perceived as lacking transparency and being slow in handling cases. Based on these issues, this study aims to analyze how the principles of transparency and accountability are applied to enhance public trust in the Purbalingga District Attorney's Office. This research adopts the theory of good governance as defined by Sedarmayanti (2004), which describes good governance as a solid, responsible system that is effective and efficient, while maintaining synergy between the private sector, the public, and the government.

This research uses a descriptive qualitative method with purposive sampling. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation, and the data were analyzed using an interactive analysis model. The validity of the data was ensured using methodological triangulation, a technique for verifying the authenticity of data by employing different data collection methods. The results of this study indicate that the implementation of the principles of transparency and accountability has not been well-executed. This is evident from the lack of socialization regarding case service information for theft crimes, public information on the PPID that has not been updated every six months, and the absence of transparency in performance reports and financial reports. Additionally, the sub-aspects of meticulousness, employee professionalism, and clarity of regulations are still not optimal.

The conclusion of this study is that the implementation of the principles of transparency and accountability in enhancing public trust at the Purbalingga District Attorney's Office has not been well-implemented. There are several areas that Purbalingga District Attorney's Office needs to improve in terms of transparency and accountability to enhance public trust in their institution.

Keywords: transparency, accountability, public trust